



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TANTANGAN INDONESIA DALAM MENGOPTIMALKAN WISATA HALAL DI TINGKAT GLOBAL

Eka Budiyantri

Analisis Legislatif Ahli Madya

eka.budiyantri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Industri wisata ramah muslim atau wisata halal terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tingkat global. Berdasarkan data dari *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023 yang dirilis oleh Mastercard dan CrescentRating, jumlah wisatawan muslim dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 230 juta orang pada tahun 2028. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam sektor ini. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia, negara tetangga yang lebih dulu berhasil memposisikan diri sebagai tujuan utama wisata halal. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Sarasehan Ekonomi Islam Indonesia di Jakarta.

Airlangga menyebut bahwa meskipun sejumlah destinasi wisata halal di Indonesia sudah mulai berkembang, wisatawan muslim dari luar negeri terutama yang berasal dari Timur Tengah masih lebih banyak yang memilih Malaysia sebagai tujuan utama. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan dari segi jumlah dan keragaman objek wisata yang jauh lebih melimpah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan para pelaku industri pariwisata untuk merumuskan strategi agar potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.

Lebih jauh, Airlangga juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya telah menjadi pelopor dalam hal pengaturan produk halal. Produk makanan dan minuman halal dari Indonesia telah berhasil menembus berbagai pasar global, seperti Brunei, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah mengatur sistem jaminan produk halal dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Meskipun sertifikasi halal sudah diatur dengan baik dalam UU JPH, namun implementasinya belum berjalan optimal. Implementasi sertifikasi ini tidak boleh hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga harus mencakup sarana wisata, akomodasi, serta layanan pendukung lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen pariwisata halal di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan muslim, khususnya dari Timur Tengah yang menjadi pasar utama.

Sejalan dengan pandangan Airlangga, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia menyebutkan bahwa industri halal merupakan sektor ekonomi yang sangat potensial. Namun, Sri Mulyani juga mengakui masih banyak hambatan, terutama dalam bentuk kebutuhan akan insentif kebijakan dan regulasi yang mendukung. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah mulai memberikan insentif perpajakan serta membangun kawasan industri halal, tetapi upaya tersebut masih perlu diperkuat dan diperluas agar dampaknya lebih signifikan.

Sementara itu, Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Moch. Bukhori Muslim, menambahkan bahwa keterbatasan jumlah hotel syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Bukhori mengungkapkan dua aspek utama yang sulit dipenuhi oleh hotel dalam menerapkan standar syariah. *Pertama*, mayoritas hotel memiliki fasilitas kolam renang, namun belum mampu menerapkan sistem pemisahan waktu penggunaan antara pria dan wanita sebagaimana diatur dalam syariat Islam. *Kedua*, masih banyak hotel, terutama kelas menengah ke atas yang menyediakan minuman beralkohol. Untuk hotel yang ingin mendapatkan predikat syariah, operasionalnya harus sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal produk yang dijual dan sumber pendapatannya.

Ketimpangan antara potensi dan kenyataan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan strategis. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku industri, investor, dan komunitas muslim internasional untuk membentuk ekosistem wisata halal yang kompetitif. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan promosi, peningkatan kualitas layanan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan penerapan standar halal internasional. Jika langkah-langkah ini diimplementasikan dengan serius dan konsisten, Indonesia bukan hanya mampu mengejar ketertinggalan dari Malaysia, tetapi juga berpotensi besar menjadi pusat destinasi wisata halal dunia. Dengan keunggulan geografis, budaya, dan keagamaan yang dimiliki, Indonesia memiliki semua syarat untuk memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri wisata halal global yang kian pesat.

Atensi DPR

DPR RI, terutama Komisi VII, perlu mendorong kolaborasi antara semua pihak terkait, termasuk kementerian, lembaga, pelaku bisnis, dan organisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengembangan ekosistem wisata halal di Indonesia. Pengembangan ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan fasilitas pariwisata yang sesuai dengan standar syariah, serta pengembangan produk dan layanan yang ramah bagi muslim. Kebijakan yang komprehensif, yang meliputi insentif fiskal dan non-fiskal, diyakini dapat mendorong lebih banyak investasi dalam industri wisata halal. Di samping itu, promosi wisata halal di pasar internasional perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dahulu mengembangkan sektor ini, seperti Malaysia. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia dan memaksimalkan potensi ekonomi sektor pariwisata halal yang semakin berkembang.

Sumber

finansial.bisnis.com, 15 Mei 2025;
kompasiana.com, 13 Mei 2025;
liputan6.com, 11 Mei 2025;

nasional.kontan.co.id, 15 Mei 2025; dan
netralnews.com, 16 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa